

Dianiaya dan Tidak Boleh Kerja, Pekerja RDMP Pertamina Ngadu ke Dewan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menerima pengaduan dari pekerja Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau Kilang Minyak Balikpapan yang diduga mengalami dugaan penganiayaan dan tak boleh masuk kerja

“Kita baru saja menerima warga terkait pengaduan pekerja yang ada di RDMP tentunya pengaduan salah satunya, saya mendengar tadi ada kekerasan, yang kedua ada juga pelanggaran terkait industrial,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, Rabu (23/03/2022).

Pelapor yakni Sugeng Hariyanto tak diperkenankan masuk kerja. Termasuk juga mengalami penganiayaan. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Balikpapan, Selasa (21/03/2022) kemarin.

“Karena disana saya tadi menemukan juga datanya bahwa beliau ini saudara Sugeng Hariyanto mempunyai kontrak kerjadengan adanya kejadian ini beliau juga ternyata dilarang masuk ke lingkungan kerja, sementara belum ada kejelasannya kenapa dilarang,” terangnya.

Soal kasus dugaan penganiayaan, Budiono menyerahkan ke pihak kepoisian untuk menangani. Pihaknya, akan menangani soal hubungan industrial atau soal larangan masuk kerja.

“Terkait kekerasan mungkin dari pihak kepolisian. Saya ingin konsen terkait dukungan kerja karena disana ada kontrak kerja, ada haik dan kewajiban disana kita juga melihat ada datanya, bahwa ternyata beliau juga ada hak-haknya yang dirampas “tidak diterima”,” paparnya.

Dia mengungkapkan, akan segera mengagendakan, menggelar rapat

dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait maupun Sugeng Haroyanto dan reka-rekannya yang jadi korban.

“kita nanti akan coba panggil pihak-pihak terkait, tadi juga ada salah satunya BPJS-nya segala macam. Secepatnya akan kita agendakan RDP dengan pihak-pihak terkasit bersama Pak Sugeng Harioyanto,” tegasnya.

“Terkait tenaga kerja ada di Komisi IV, terkait hukum komisi I teman-teman bisa mengawal dan menindaklanjutinya,”ucapnya.

Dia menambahkan, masih menunggu kelengkapan administrasi dari pengadu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan RDP bersama.

“Saya menunggu suratnya tertulis, karena disana saya minta dilampirkan kontrak kerjanya, termasuk ada kertas yang di tempel di Security dilarang masuk,” tutupnya.